

## **PENILAIAN KINERJA DI ERA COVID (Study Kasus di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan)**

Andi Dewi Andriani<sup>1</sup>, Andi Kusumawati<sup>2</sup>, Darmawati Darmawati<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>**Accounting Faculty of Economics and Business, Hasanuddin University**  
Email: adewiandriani12@gmail.com

### **ABSTRAK**

*9,278 lives have been lost. 130,538 patients are still struggling. However, 85,831 people have proven that sick because of the new type of Corona Virus or COVID-19 can be cured. (Liputan6.com). In Indonesia, there were 12,438 cases of Corona virus infection with 895 people dying and 2,317 declared. The World Health Organization (WHO) has paid special attention to the special policies of a number of countries that have begun to ease lockdowns or lockdowns in their territories. (Sindonews.com May 7, 2020). As a result of this pandemic, the life of the Indonesian economy has become devastated. The service and trade sectors have become stagnant. So that many of us see and read in the mass media, termination of employment to informal sector workers because production is hampered. The social impact caused by this pandemic has become a serious concern of the government by forming a task force. This task force coordinated by the social service distributed social assistance to people affected by the Covid 19 outbreak. In terms of distribution of distribution, social services have involved all lines of government starting from the lowest line, as well as reporting of results, also involving all areas of supervision, one of which is the inspectorate*

*Keyword: Covid 19, Social Assistance, Constraints, Accountability*

### **ABSTRAK**

Sudah 9.278 nyawa melayang. 130.538 pasien masih berjuang. Namun, 85.831 orang telah membuktikan, sakit karena [Virus Corona](#) jenis baru atau COVID-19 dapat disembuhkan. (Liputan6.com). Di Indonesia, tercatat ada 12.438 kasus infeksi virus Corona dengan 895 orang meninggal dan 2.317 dinyatakan sembuh. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan perhatian khusus kepada kebijakan khusus sejumlah negara yang mulai melonggarkan penguncian atau lockdown di wilayahnya. (Sindonews.com 7 Mei 2020).

Akibat dari pandemi ini kehidupan perekonomian Indonesia menjadi luluh lantak. Sektor jasa dan perdagangan menjadi stagnan. Sehingga banyak kita lihat dan baca di media massa, pemutusan hubungan kerja kepada para pekerja sektor informal karena produksi menjadi terhambat. Dampak sosial yang diakibatkan oleh pandemi ini menjadi perhatian serius pemerintah dengan membentuk gugus tugas. Gugus tugas yang dikoordinasi oleh dinas sosial ini bertugas menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak wabah covid 19.

Dalam hal pendistribusian pendistribusian, dinas social telah melibatkan semua lini pemerintahan mulai dari lini terbawah, begitu juga dengan pelaporan hasil, juga melibatkan semua bidang pengawasan salah satu nya adalah inspektorat.

**Kata Kunci:** Covid 19, Bantuan Sosial, Kendala, Akuntabilitas

## PENDAHULUAN

### **Pandemi Covid 19**

Pada keadaan saat ini, dunia dihebohkan dengan adanya virus corona dan dikenal sebagai COVID-19 memicu wabah di Cina pada Desember 2019, dan merebak di berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. (<https://www.merdeka.com>)

Pada Konteks di Indonesia, pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Respon penanggulangan pandemi ini berkaitan dengan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (*LBH Jakarta*)

Sejak pertama kali diumumkan secara resmi oleh otoritas Sulawesi Selatan pada 19 Maret 2020 silam, penambahan kasus positif Covid-19 relatif eksponensial. Diawali dengan dua pasien positif dan hingga 7 April 2020, pasien yang dinyatakan positif Covid-19 di Sulawesi Selatan sudah menyentuh 122 orang dengan episentrum di Makassar beserta dua daerah penyangga yakni Gowa dan Maros. (<https://sulawesi.bisnis.com>)

Namun salah satu dampak negatif akibat pandemi covid-19 ini ialah banyaknya masyarakat yang kehilangan penghasilan, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk keberlanjutan kehidupannya. Karena kita masih kekurangan kebijakan hukum mengenai prosedur atau standar pemenuhan kebutuhan atas bencana non-alam selama masa pandemi ini, maka sudah semestinya rujukan kajian akan hal ini harus dibuat terbuka-penafsiran dengan mempertimbangkan beberapa aspek, misalnya terkait siapa penerima hak atas bantuan pemenuhan kebutuhan pokok, dimana fungsi ini di laksanakan oleh Dinas Sosial dalam hal ini penelitian dilaksanakan pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

### **Deskripsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan**

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menurunkan angka populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) pada 24 Kabupaten/Kota. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Kebijakan Teknis di bidang Sosial, meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta Bidang Informasi dan Sumber Daya Sosial.
2. Penyelenggaraan urusan sosial dan pelayanan umum di bidang sosial meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta Bidang Informasi dan Sumber Daya Sosial.
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang sosial meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Bidang Informasi dan Sumber Daya Sosial.
4. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. ([info.metrokota.go.id](http://info.metrokota.go.id))

Dalam menjalankan tugas dan fungsi , Dinas Sosial membagi tugas dalam 4 bidang yaitu; bidang sosial, melaksanakan program dan kegiatan penanganan fakir miskin, perlindungan sosial, jaminan sosial dan penghimpunan data dan informasi PMKS (penyandang masalah kesejahteraan social) dan PSKS (potensi dan sumber kesejahteraan social) serta data penerima program jaminan sosial lainnya. Dalam hal penanganan pandemi ini merupakan fungsi dari Seksi perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan tugas dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan upaya mencegah dan menangani risiko guncangan dan kerentanan sosial serta untuk menjamin PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. (<https://sulselprov.go.id/>)

Bidang seksi perlindungan dan jaminan sosial ini yang mempunyai peran dalam mengatur penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena pandemic covid 19 ini.

## TINJAUAN LITERATUR

Teori agensi merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara *principle* dan *agent*. Dalam hal ini hubungan keagenan merupakan kontrak antara satu orang atau lebih yang mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen and Meckling, 1976).

Berdasarkan teori ini, terjadi pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*) sehingga menimbulkan *agency problem*. Selanjutnya pemisahan pemilik dan pengelola juga menimbulkan asimetri informasi yaitu suatu keadaan dimana *agent* memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak *principle*. Asimetri

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan pada kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang menyalurkan APBN/APBD Bantuan Sosial dalam penanganan Pandemi Covid 19. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara (interview), dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian ini kepada Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Tagana se Sulawesi Selatan, Penerima Bantuan Sosial dan RT salah satu keluarahan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Dasar aturan bantuan social untuk Covid 19

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (PMK 43/2020)

Dimana ruang lingkup peraturan ini mengenai:

- Mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19);

informasi muncul ketika *agent* lebih banyak mengenal (mengetahui) informasi internal dan prospek masa yang akan datang, dibandingkan pengetahuan tentang informasi yang dikenal/diketahui oleh *principal* dan *stakeholder* lainnya (Anugerah, 2014). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk bertindak dengan mengutamakan kepentingan pribadinya (Jensen and Meckling 1976).

Dalam pemberian bantuan ini, Dinas Sosial (*principal*) menggunakan APBD juga APBN untuk pengadaan bantuan sosial dan mendistribusikan bantuan ke 24 kabupaten di Kota Makassar yang terdampak pandemi oleh relawan dan tagana (Taruna Siaga Bencana) di daerah (*agent*).

Penelitian melakukan pengamatan (observasi) secara langsung terhadap kegiatan pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi. Sedangkan wawancara dilakukan dengan para informan yang benar benar memahami dan terlibat langsung kegiatan pelaksanaan bantuan.

Penelitian dilanjutkan dengan analisa terhadap beberapa dokumen penunjang seperti media sosial, internet, dan dokumen dokumen lainnya. Setelah menganalisis dokumen penunjang, selanjutnya melakukan analisis terhadap mekanisme pendistribusian dan akuntabilitasnya.

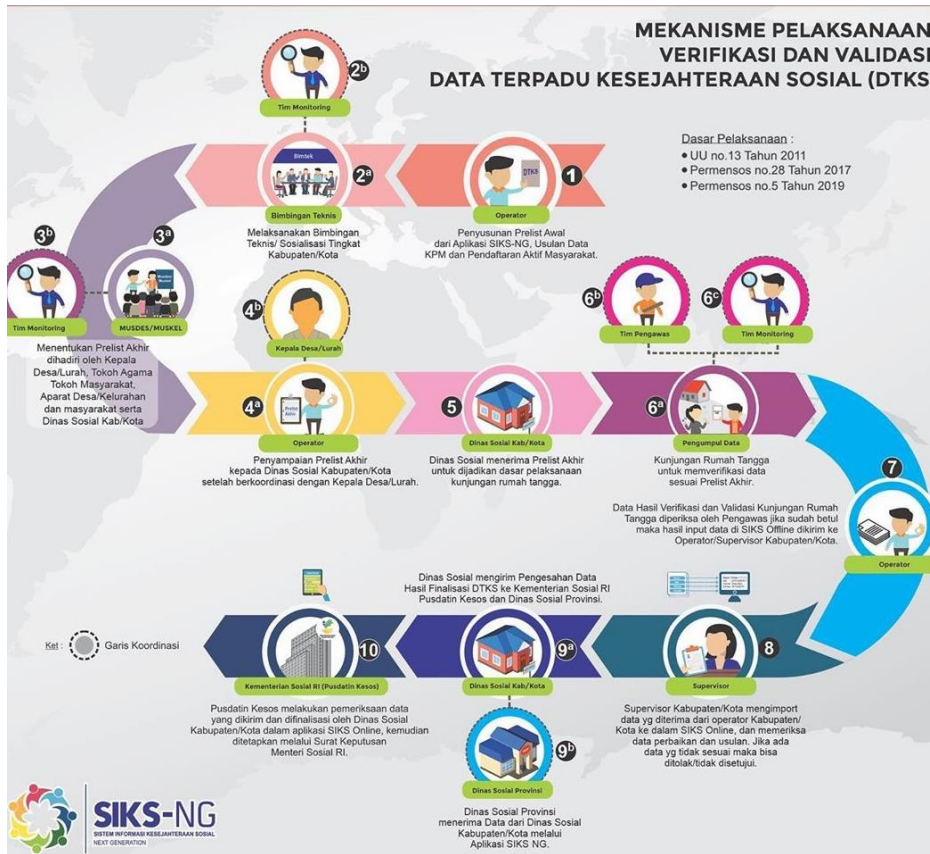
- Alokasi dana untuk penanganan pandemi COVID-19 dialokasikan dalam DIPA kementerian negara/lembaga;
- Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19, alokasi dana penanganan pandemi COVID-19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus COVID-19;
- Berlakunya PMK 43/2020 dalam masa penanganan pandemi COVID-19. (Salinan Kemenkeu)

Berdasarkan penjelasan diatas, perihal dasar aturan penggunaan dana untuk bantuan sosial pandemic, maka diketahui bahwa sumber dana digunakan adalah dari APBN

namun karena penelitian dilakukan pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan maka dana yang lebih besar digunakan adalah berasal dari APBD, sampai pada upaya efisiensi anggaran berupa pemangkasan dana pembelanjaan lintas lembaga.

Awal Penyaluran adalah dimulai awal sd akhir April 2020 dengan jumlah paket

33.700KK dengan nominal Rp16.3M untuk tahap pertama (<https://makassar.antaranews.com>) dan sementara untuk tahap ke dua masih dalam tahap review yang dibahas bersama Inspektorat, BPKP, Kajati .



**Gambar 1. Mekanisme pendataan Masyarakat penerima Bansos**

*Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Sumber Sekjen Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial)*

Terkait pendataan penerima bansos, Kemensos sudah memberikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kepada kepala daerah. Data ini bisa digunakan sebagai acuan dalam pengusulan data bansos tunai dan memberikan kebebasan kepada pemerintah setempat untuk mengusulkan data penerima yang berada di luar DTKS. Namun, pengusulan itu harus memenuhi syarat bahwa individu bukan penerima bansos program keluarga harapan (PKH) dan/atau bukan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT). "Hal ini dilakukan untuk menghindari overlap penerima bansos Covid-19," (*kompas.com*)

Kemensos tak murni menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dengan alasan ada potensi orang miskin baru, saat pandemi corona, Kemensos menyerahkan masalah data ke pemda. Dan Kemensos juga menyampaikan data itu tanpa melalui verifikasi oleh Kemensos, karena jika waktu hanya dihabiskan untuk cek ke lapangan, yang terjadi adalah Covid sudah selesai, bantuan belum datang.

**Jenis Barang dan Tekhnis penyaluran Bansos**

Dinas Sosial Provinsi Makassar membagi jenis barang yaitu segala sesuatu yang berujud yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia

yang terdiri dari makanan pokok/pangan/Lauk Pauk.

**Tabel 1. Jenis Barang Perpaket**

No	Barang	Unit	Nominal
1	Beras	10 kg	Rp. 115.000,-
2	Mi Instan	1 dos	Rp. 127.000,-
3	Minyak Goreng	2 ltr	Rp. 17.000,-
4	Terigu	1 kg	Rp. 12.500,-
5	Gula pasir	2 kg	Rp. 18.000,-
6	Ikan sarden	5 kaleng	Rp. 10.500,-
7	The poci	1 bungkus	Rp. 9.000,-
8	Telur 1 rak	1 rak	Rp. 55.000,-

**Kendala dilapangan saat pendistribusian**

- a. Kendala penyaluran sembako, tidak mudah mendapatkan vendor karena pekerjaan ini jumlahnya banyak dan pembayaran dari pemerintah belakangan.
- b. Banyak produsen bahan pangan yang sudah menurunkan produksi sejak pandemi Covid-19 merebak. Sehingga kesulitan memenuhi pesanan secara cepat.
- c. Ada pabrik-pabrik yang sebagian besar karyawannya sudah mudik atau bahkan dirumahkan sehingga apa yang terjadi tidak semudah seperti yang diinginkan, untuk dapat sesegera mungkin mendatangkan bahan-bahan tersebut.
- d. Tingkat kecepatan dalam pengepakan bansos hingga distribusi bansos tidak bisa secepat waktu normal. Karena begitu bekerja satu minggu bulan puasa dimulai, sehingga karena ini pekerjaannya sangat manual, tentunya tidak bisa memaksa para vendor dan para pekerja di vendor-vendor tersebut untuk bekerja secepatnya. Salah satunya dengan melakukan pengurangan jenis item barang dari 10 menjadi 4 item yang dipesan dari vendor dan juga menambah jumlah vendor dari 5 menjadi 14. Namun tidak semua bisa perform karena masing-masing vendor ada kendalanya seperti kendala keuangan dan lain sebagainya, (<https://www.merdeka.com>)
- e. Sesuai dengan hasil temuan BPK Pemerintah berpatokan dengan DTKS yang terakhir diverifikasi pada 2014. Terlebih lagi mengingat dampak ekonomi yang luar biasa dari corona. Dimana seharusnya data itu di-update 6 bulan sekali, ([CNNIndonesia.com](https://www.cnnindonesia.com)),

- f. Banyaknya data penerima yang tidak valid serta data ganda/dobel penerima bansos yang kemudian diperbaiki kembali oleh Dinas Sosial Kota Makassar, bahkan dari pengakuan Dinas Sosial bahwa kendala yang terjadi saat penyaluran Bansos tersebut dikarenakan masih banyaknya data warga yang ganda, tidak hanya itu, bahwa adanya tumpang tindih dilapangan karena masih ada pihak atau oknum yang mengintervensi penyaluran Bansos covid 19, disebutkan oknum tersebut disebut adalah Dekkeng (orang dekat penerima).(<https://smartcitymakassar.com>)
- g. Keterbatasan bahan yang menjadi isian dari paket tersebut. saat pemerintah hendak membeli barang untuk mengisi paket, tetapi ketersediaan barang justru tidak cukup. Untuk beras, gula maupun mi instan, tidak ada masalah. Hanya saja ada barang-barang tertentu yang mulai sulit didapatkan, seperti ikan kaleng, minyak yang merupakan barang yang harus didatangkan dari luar Sulawesi Selatan.
- h. Dengan adanya pembatasan sosial , berakibat kurangnya tenaga kerja untuk membantu pengepakan . (<https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/>)

**Akuntabilitas dana yang digunakan untuk pendistribusian Bansos**

Untuk Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal akuntabilitas pendistribusian yaitu dengan menggunakan aplikasi laporan yang dinamakan *SiCovid*, sistem ini di buat sendiri oleh Dinas social Provinsi Sulawesi Selatan, dimana setelah selesai pendistribusian maka seluruh kabupaten akan mengirimkan hasil pendistribusiannya by name by address

dan kemudian secara otomatis dikantor Dinas Sosial Provinsi akan terekap siapa yang sudah menerima bansos tersebut, selain itu kabupaten dan kota makassar sendiri akan mengirimkan hardcopy berupa BAST penyerahan yang juga ditandatangani oleh Lurah setempat, beserta foto foto penyerahan.

Tahap pertama jumlah paket 33.700KK dengan nominal Rp16.3M telah selesai di bulan April, dan Dinas Sosial Provinsi sudah meminta Inspektorat melakukan Audit ditahap ini, guna mengetahui dan mengevaluasi kinerja di Tahap 1.

### **Masyarakat Penerima Bansos**

Dalam Hal ini dilakukan pada 2 (dua) macam penelitian yaitu, masyarakat yang sudah menerima dan masyarakat belum menerima namun layak menerima.

Untuk Masyarakat yang belum menerima seperti contoh Masyarakat atas nama Hasma, sudah mengumpulkan KK dan KTP dibulan April dan atas inisiatif sendiri, karena info dari keluarga yang juga sudah mengumpulkan dokumen ke RT, namun sampai dengan saat ini belum menerima bansos, sementara keluarganya sudah menerima. Yang bersangkutan masih berharap pada bantuan di tahap kedua.

### **Relawan/Tagana**

Taruna Siaga Bencana adalah suatu organisasi sosial yang dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial RI yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang berbasis masyarakat. Pembentukan TAGANA merupakan suatu upaya untuk

### **Andi Dewi dkk., Penilaian Kinerja...**

memberdayakan dan mendayagunakan generasi muda dalam berbagai aspek penanggulangan bencana, khususnya yang berbasis masyarakat. Terdapat 1300an Tagana di Sulsel. Selain itu hampir semua anggota TAGANA telah mengikuti pelatihan dibidang penanggulangan bencana dan bidang kesejahteraan sosial. Sebagai suatu organisasi, TAGANA mampu mengembangkan program dan kegiatannya secara berkelanjutan. (Fajar K. 2017)

Kendala yang dihadapi adalah data yang Valid dan Jujur, juga waktu yang dibutuhkan, bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk pencocokan DTKS dari kemensos dengan data baru dari pemerintah setempat (lurah), namun tetap dengan syarat dari Kemensos bagi penerima bansos yaitu :

1. Terdampak langsung positif covid, PDP,ODP isolasi mandiri
2. Terdaftar di DTKS yang non penerima program.
3. Masyarakat terdampak yang di PHK.atau hilangnya mata pencaharian.

Selain hal tersebut diatas, selama pandemi ini terdapat kendala yang ada akibat dari PSBB, petugas sempat terkendala masuk ke daerah tersebut, jadi harus dengan beberapa penjelasan terlebih dahulu untuk bisa melakukan pendistribusian sehingga ada beberapa yang tidak bisa langsung bertemu dengan penerima bantuan, namun dipersyaratkan bagi penerima bantuan agar mencantumkan no Hp, untuk bisa di crosscek secara sampling apakah bantuan sudah diterima atau belum.

kenyataan yang ada di lapangan. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini sebagai pelaksana dalam hal penyaluran Bansos ke Masyarakat terdampak covid telah melibatkan berbagai lini pemerintahan mulai dari pendataan sampai dengan pendistribusian. SiCovid adalah program yang digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga Akuntabilitas pertanggungjawaban atas pendistribusian Bansos masyarakat terdampak ke 24 Kabupaten di Sulawesi Selatan, dan melibatkan Inspektorat untuk melakukan Audit atas evaluasi kinerja nya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Salah satu permasalahan yang paling krusial yang dihadapi oleh Pemerintah dan Masyarakat pada situasi wabah pandemi COVID-19 adalah belum siapnya infrastruktur data penduduk yang jelas. Tiap-tiap Pemerintah Daerah kewalahan dalam mengidentifikasi siapa warga penduduk yang berhak mendapatkan bantuan sosial, karena data yang ada di Pemerintahan tidak sesuai atau tidak lengkap dan berbeda dengan

### Saran

1. Adanya Sinkronisasi data pusat dan daerah, membentuk *big data* tunggal menjadi solusi tepat. DTKS harus dimutakhirkan berkala oleh Kemensos, kemudian diintegrasikan dengan data kependudukan Kemendagri
2. Belum tersinkronisasi dan belum muktahirnya data penduduk berimbas pada potensi pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Di sisi lain, Pemerintah juga harus mengidentifikasi dan memperbaharui data-data mengenai kelompok minoritas dan rentan pada warga penduduk di wilayahnya, yang mana kelompok tersebut merupakan salah satu kelompok yang paling penting untuk diberikan bantuan sosial.
3. Penyerahan Bansos dimungkinkan untuk mengurangi birokrasi karena data sudah tersedia sebaiknya langsung diserahkan ke penerima bantuan sesuai DTKS
4. Melakukan sosialisasi terhadap penyaluran bantuan sosial karena masyarakat yang sudah menerima bansos masih bingung bantuan tersebut dari mana, dan yang belum menerima juga bingung kapan akan menerima.
5. Sebaiknya ada sanksi bagi yang disebut Dekkeng (orang dekat penerima), mengutamakan orang-orang tertentu yang sebenarnya tidak segera diberikan bantuan.

### DAFTAR PUSTAKA

Anugerah, Rita.(2014) **“Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud”**, Jurnal Akuntansi Universitas Riau, Volume 3 Nomor 1, Oktober,2014.

Arifin, Nurdin Dj, Yusnita N.(2019); **Analisis Proses Perencanaan penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Morowali)**; e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 12, Desember 2017 hlm 86-98 ISSN: 2302-2019

Arika Bagus P, dkk (2020); **Melindungi Pekerja Rentan di Masa (dan Pasca) Pandemi Covid-19 ; April 2020 IGPA MAP FISIPOL UGM dan Forbil Institute.**

Buana DR.(2020); **Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa ; Article · March 2020 DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15082 ; <https://www.researchgate.net/publication/340103659>**

Didiet R, dkk (2017); **Pengelolaan Gudang Logistik Kemanusiaan BNPB Humanitarian Logistic Warehouse Management;Jurnal**

**Manajemen Industri dan Logistik** Voll No.2 November 2017 ; Politeknik APP Jakarta, Kementerian Perindustrian;ISSN 2527-4112 online

Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No.1 Tahun 2020; **Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah**;2 April 2020

Izzaty,(2020), **Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Panic Buying Akibat COVID-19**; Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 2; Kajian Slingkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis; Vol. XII, No.5/I/Puslit/Maret/2020

Jensen, M. C., and W. Meckling. **“Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure”**, *Journal of Financial Economic* 3, 305-360, 1976.

**Kemenkeu RI (2020); Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia ;Siaran Pers; SP – 27 /KLI/2020 ; Jakarta, 17 April 2020**

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 440/2622/SJ; ***Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Daerah***; 29 Maret 2020.

Surat Edaran Komisi Pemberantas Korupsi No.11/Tahun 2020; ***Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat***;21 April 2020.

LBH Jakarta(2020) ***“Penanganan Wabah Pandemi Covid 19 dan Penerapan PSBB di Jabodetebek Harus Memperhatikan Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Hak Warga ; Kertas Posisi 2020***

Lestary J.dkk (2020); ***Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?*** ; CSIS Commentaries ECON-002-ID 15 April 2020

Peraturan Menteri Keuangan RI No.43/PMK.05/2020; ***Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019***;24 April 2020

Purwanto A, dkk (2020);***Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar***;Journal off Education,Psychology and Counseling; Volume 2 Nomor 1 (2020) ISSN Online : 2716-4446

Putra AF.(2014); ***Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan pada program UEP dan KUBE***; Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7, Nomor 2, Juli 2014 (127-136) ISSN 1979-5645

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/15065431/data-penerima-bansos-bermasalah-ini-penjelasan-kemensos>.

[  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512093741-32-502340/semrawut-data-bansos-corona-saling-serang-pusat-daerah> (<https://www.merdeka.com/peristiwa/mensos-beberkan-kesulitan-penyuluran-bansos-saat-pandemi-covid-19.html>)

<https://smartcitymakassar.com/2020/04/29/soal-pengawasan-bantuan-sosial-dampak-covid> ([https://sulselprov.go.id/pages/des\\_opd/dinas-sosial-provinsi-sulawesi-selatan](https://sulselprov.go.id/pages/des_opd/dinas-sosial-provinsi-sulawesi-selatan) )

(<https://makassar.antaraneews.com/berita/175356/dinsos-sulsel-siapkan-rp163-miliar-untuk-bantu-warga-terdampak-covid-19>